BAB III

BURUH DAN GERAKAN SOSIAL

A. Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)

1. Kondisi Umum Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang tepatnya pada posisi 7 27' – 10,9" Lintang Selatan, dan 112 43' – 2,4" Bujur Timur, yang administrasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Kota Surabaya, Kabupaten Gresik
- ✓ Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto
- ✓ Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- ✓ Sebelah Timur : Selat Madura

Kabupaten Sidoarjo memiliki luas 719,63 km dan di Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Dan ini daftar kecamatannya yaitu : Sidoarjo, Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Prambon, Porong, Sedati, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, dan Wonoayu.

Dan lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di Kecamatan Gedangan yang berbatasan dengan Kecamatan Waru disebelah utara, Kecamatan Sedati disebelah timur, Kecamatan Buduran disebelah selatan, dan Kecamatan Sukodono disebelah barat. Kecamatan ini terkenal dengan industri logam, topi, dan masih banyak lainnya, dan salah satu tempat industri logam seperti sparepat berada di Desa Keboan Sikep, Gedangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa perindustrian yang berada di Kecamatan Gedangan ini seperti : PT. Kayana Indonesia, PT. Digi Sinergi Perkasa, Kampung Topi, CV. Karya Mandiri, PT. Ranteindo Teknik Mandiri, PT Motasa Indonesia, PT. Prima Karya Cemerlang dan PT. Pakarti Riken (PT. Parin) dan masih banyak lagi perindustrian di Sidoarjo yang tidak tersebut. Maka dari itu Sidoarjo juga disebut surganya perindustrian karenanya banyaknya lapangan pekerjaan atau perindustrian yang ada, yang semakin lama akan bertambah dan bertambah lagi.

2. Sejarah Singkat FSPMI

SPMI dideklarasikan saat dilaksanakannya Munas Luar Bisa SP LEM SPSI Reformasi pada tanggal 4 sampai 7 Februari 1999 di Hotel Tirta Gangga Garut Jawa Barat dengan diprakasai oleh (Alm) H. R. Endang Thamrin, Drs. H. Thamrin Mosii dan Makmur Komarudin.

Kemudian dari hasil deklarasi yang terjdi pada tanggal 4 sampai 7 Februari tersebut, muncul Kongres :

Kongres I

Pada tanggal 6 Februairi 1999, didirikanlah SPMI dengan dipilihnya Drs. H. Thamrin Mosii sebagai Presiden dan (Alm) R. H. Endang Thamrin sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 1999 sampai 2001. SPMI beranggotakan para pekerja di sektor industri metal yaitu elektronika dan elektrik, automotive, mesin dan komponen seperti logam serta dok dan galangan kapal serta Dirgantara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kongres II

Pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September 2001, di Lembang dilaksanakan Kongres ke II SPMI dan dirubah bentuk organisasi dari unitaris SPMI menjadi Federasi FSPMI dengan tujuan memperkuat peran Serikat Pekerja Anggota yaitu SPEE, SPAMK, SPL, SPDG, dan SPDI. Hasil Kongres dipilih Drs. H. Thamrin Mosii sebagai Presiden dan Ir. H. Said Iqbal sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 2001 sampai 2006. SPMI diterima sebagai anggota IMF (International Metal Workers Federation) pada Kongres IMF ke 30 yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 2011 di **Sydney** Australia.

Kongres III

Pada tanggal 24 sampai 27 November 2006 di Bandung dilaksanakan Kongres ke III FSPMI. Dan hasil dari Kongres tersebut dipilih Ir. H. Said Iqbal sebagai Presiden dan Basril Hendrisman Amd sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 2006 sampai 2011. Rapat Pimpinan 6 November 2007 memutuskan perubahan logo FSPMI dan menjadikan FSPMI sebagai Serikat Pekerja yang berjuang di pabrik dan publik. Kemudian ditetapkan juga Platform FSPMI yang dikenal dengan 9 Program Umum, 5 Pilar Pendukung, 10 Strategi Perjuangan dan 6 Issue Utama.

Kongres IV

Pada tanggal 6 sampai 8 Februari 2011 di Bandung dilaksanakan Kongres ke IV FSPMI. Hasil Kongres dipilih Ir. H. Said Iqbal sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden dan Suparno Beno sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 2011 sampai 2016. Secara resmi Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) dan FSPMI dideklarasikan dan bergabung di FSPMI. Untuk SPDG pada Munasnya juga memutuskan untuk merubah nama menjadi Serikat Pekerja Pelayaran dan Jasa Maritim (SP PJM). FSPMI tersebar di Provinsi Nagro Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Utara, tersebar di 36 Kabupaten dan Kota.

Gambar 3.1

Lambang Organisasi FSPMI

FSPMI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

2.1 Fungsi dan Tujuan Terbentuknya FSPMI

Organisasi FSPMI ini berfungsi :

a. Sebagai wadah dan sarana pembinaan pekerja Indonesia pada industri dan jasa untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan disiplin, etos kerja dan produktifitas.

b. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program Pembangunan Nasional khususnya di sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Industri, Ekonomi, Pendidikan, Hukum, Sosial Politik dan Budaya Bangsa.

c. Sebagai pelindung dan pembela hak dan kepentingan anggota beserta keluarga.
d. Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga baik lahir maupun batin

Tujuan Organisasi FSPMI :

a. Turut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjalankan UUD 1945 beserta amandemennya.
b. Menghimpundan menyatukan kaum pekerja khususnya dalam lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan industri dan jasa seperti, logam, elektronik elektrik, automotif mesin komponen, dirgantara serta dok dan galangan kapal.
c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab.
d. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan keluarganya.
e. Meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.
f. Memantapkan hubungan industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2 Visi dan Misi

Visi : Membangun Serikat Pekerja yang Demokratis, Bebas, Representatif, Independen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Misi :

a. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusian yang adil dan beradab.
b. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerjja dan keluarganya.
c. Meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja.

2.3 Program Aksi Organisasi FSPMI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka pada Kongres II FSPMI menetapkan Program Aksi FSPMI yang harus ditangani yaitu:

a. Perlindungan dan Pembelaan
   1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas PKB.
   2) Memantau pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan advokasi dan menyelesaikan perselisihan perburuhan

b. Pemberdayaan Pekerja Perempuan

1) Membentuk direktorat dan biro perempuan di seluruh perangkat organisasi.
2) Mendorong pekerja perempuan untuk aktif dalam berorganisasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
3) Mensosialisasikan dan mengkampanyekan permasalahan gender dan isu-isu permasalahan pekerja perempuan

c. Konsolidasi dan Revitalisasi Organisasi

1) Mengorganisir pekerja yang belum terorganisir dengan target jumlah anggota 250.000 orang dan 500 unit kerja sampai tahun 2011.
2) Menguatkan dan mengoptimalkan fungsi Sekretaris Jendral, SPA dan Audit sebagai prinsip dan tata kelola keuangan dan kinerja organisasi yang transparan dan bertanggung jawab

d. Ekonomi dan kesejahteraan

1) Mempromosikan tereujudnya undang-undang pengupahan sebagai acuan sistem pengupahan layak nasional dan sistem upah sektoral.
2) Memperjuangkan terlaksananya jaring pengaman sosial melalui sistem jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mendorong tumbuhnya koperasi pekerja disetiap perusahaan.
4) Membentuk induk Koperasi Buruh Metal Indonesia (INKOPBUMI) dan membentuk kode etik usaha.

e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1) Mensosialisasi undang-undang dan peraturan K3.
2) Menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan K3 sesuai prioritas.
3) Melakukan monitoring dan pembentukan tim pelaksana K3 di tempat kerja.

f. Konsolidasi Keuangan

1) Mendorong disiplin anggota dalam membayar iuran sebesar 1% dari upah.
2) Konsisten melaksanakan keputusan Kongres II tentang mekanisme pembanyaran iuran anggota.
3) Menyusun program anggaran penerimaan dan pengeluaran organisasi serta profesionalisme administrasi.
4) Menyusun dan menyiapkan data keuangan untuk auditor sebagai laporan dan mengoptimalkan fungsi bendahara.
5) Membuat PO tentang keuangan Organisasi dan laporan tahunan keuangan organisasi.

g. Pengembangan Kemampuan Informasi dan Komunikasi

1) Mempromosikan seluruh perangkat organisasi yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak penunjang komunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menerbitkan brosur, buletin serta mendokumentasikan kegiatan organisasi.
3) Aktif membangun komunikasi dengan perangkat organisasi perburuhan lainnya di tingkat Nasional dan Internasional.

h. Pendidikan, Pelatihan, dan Kaderisasi
1) Menyusun pedoman kurikulum dan silabus pendidikan.
2) Mencetak juru didik yang standar.
3) Melaksanakan pelatihan-pelatihan kaderisasi, peningkatan kemampuan kepemimpinan dan pengorganisasian.
4) Aktif dan bekerjasama dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan dengan organisasi-organisasi perburuhan Internasional, antara lain IMF, ACILS, FNV, SASK, IF Metal dan FES.
5) Menyusun PO tentang pelaksanaan pendidikan dan buku panduan pendidikan.
6) Membangun pola dan sistem kaderisasi.

i. Membangun Solidaritas Pekerja
1) Berperan aktif menjadi dan sebagai anggota Internasional Metal Workers Federation (IMF) industian All.
2) Aktif dalam politik perburuhan dengan membuat kode etik berpolitik bagi organisasi.

2.4 Garda Metal

Garda Metal merupakan salah satu dari 5 pilar FSPMI dan berfungsi sebagai barisan terdepan perjuangan FSPMI serta untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan FSPMI. Tidaklah mudah untuk menjadi seorang garda metal, harus melalui latsar, apa latsar itu? Latsar adalah latihan dasar yang diberikan kepada semua anggota garda metal, latihan ini berupa latihan fisik, ketangkasan, ketaatan, serta kesolidan.

5 Pilar Pendukung FSPMI

a. Garda Metal

Alat perjuangan organisasi untuk melakukan penggalangan massa dan aksi-aksi demontrasi dalam memperjuangkan isu buruh, isu kebangsaan dan isu solidaritas Internasional.

b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSPMI

Alat perjuangan organisasi yang resmi tercatat di notaris dan Pengadilan Negeri Jakarta, berfungsi untuk melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota FSPMI (atau buruh lainnya) dalam menyelesaikan kasus perselisihan perburuhan, kasus perdata maupun kasus terpidana.

LBH FSPMI terdiri dari 1 LBH tingkat pusat dan 9 LBH tingkat Propinsi dengan jumlah pembela atau pengacara lebih dari 70 orang yang berlatar belakangpendidikan S1 dan S2. Beberapa diantaranya sudah memiliki izin beracara dan sertifikat advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Koran Perdjoeangan diterbitkan oleh FSPMI

Sebagai media perjuangan organisasi dan alat propaganda isu-isu perburuhan secara nasional, karena selama ini tidak ada satupun surat kabar Nasional yang secara khusus memberitakan isu-isu perburuhan. Maka Koran Perdjoeangan yang hadir secara nasional dengan tiras lebih dari 7500 eksplempar bertujuan menjawab persoalan ini (buruh dan masyarakat umun dapat berlangganan).

d. Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia – INKOPBUMI

Alat perjuangan organisasi dalam upayan meningkatkan, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada pada anggota FSPMI (buruh Indonesia) serta bertujan meningkatkan ekonomi organisasi.

e. Pusat Pendidikan Buruh (Training Centre) milik FSPMI

Alat perjuangan organisasi dalam rangka mencetak kader yang berkesinambungan, keilmuan, loyalitas dan militan dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan Bangsa Indonesia.

Tujuan Garda Metal disini untuk mengawal setiap aksi FSPMI dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota FSPMI dan keluarganya. Dan memiliki Dwi fungsi yaitu :

a. Fungsi Organisasi : Menjalankan tugas membantu induk organisasi (FSPMI) dalam menjalankan fungsinya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana untuk mencapai kesejahteraan seluruh pekerja dan keluarganya.

b. Fungsi Kemasyarakatan : Menjalankan tugas membantu anggota masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Motto perjuangan Garda Metal adalah "**RESOLUSI**", Garda Metal FSPMI kini telah menjadi harapan baru bagi buruh dan rakyat Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan di negeri yang kita cintai ini.

a. **RE** : Rela (Masuk menjadi anggota Garda Metal atas dasar kerelaan hati tanpa paksaan).
b. **SO** : Solid (Satu komando, bertindak sesuai intruksi, menjunjung tinggi kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan buruh atau pekerja)
c. **LU** : Lugas (Mudah beradaptasi dalam medan juang, dan dalam berhadapan dengan anggota lainnya)
d. **SI** : Sigap (Cepat tanggap dan rela berkorban)

Garda Metal dideklarasikan pada tanggal 27 April 2008 di Kalam Kopen Tambun, Bekasi. Dan Garda Metal FSPMI memiliki 5 sikap, yaitu:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Selalu menjaga nama baik Garda Metal dan FSPMI.
c. Menjunjung tinggi solidaritas dan kemanusiaan.
d. Berjuang demi kepentingan pekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Taat dan patuh kepada peraturan organisasi

Dan dalam Garda Metal memiliki beberapa jenjang, yaitu :

a. SILA : Tingkat Pemula, memiliki Tanda Kuning.

b. SANGGA : Tingkat Menengah, memiliki Tanda Merah.

c. CAKRA : Tingkat Atas, memiliki Tanda Biru.

d. BUANA : Tingkat Tinggi, memiliki Tanda Hitam.

Arti dari Logo :

Gambar 3.2

Logo Garda Metal

a. G : Garda atau Barisan.

b. Bintang : Cermin 5 Sikap.

c. Kepalan Tangan : Kebulan Tekad.

d. Roda Gerigi : Penggerak yang dinamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tulisan FSPMI : Induk Organisasi.

f. Tulisan Garda Metal : Garda Metal secara lembaga

Mars Garda Metal : Kami anggota Garda Metal, Siap melawan semua penindasan, tak kenal lelah tak pernah gentar, Aral menghadang kan kami terjang, Kami anggota Garda Metal, Siap berjuang demi masa depan, Kesejahteraan dan Kemakmuran, Kaum pekerja jadi tujuan.

3. Gambaran Peristiwa

Dalam kesehariannya para pekerja industri atau buruh ini melakukan hal-hal seperti yang masyarakat lain lakukan, namun yang membedakannya dikesehariannya itu adalah ketika masyarakat tersebut memulai rutinitasnya dengan bekerja di sebuah perindustrian, perusahaan atau pun bekerja ditempat-tempat lainnya. Bila dikehidupan bermasyarakat mereka tidak terlalu mementingkan urusan-urusan atau hak-hak tentang pekerjaannya dan lebih mementingkan keluarganya dan bagaimana cara membina masyarakat yang baik. Tetapi ketika mereka mulai dengan rutinitas awalnya sebagai buruh, mereka mulai memikirkan bagaimana bekerja yang baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan seperti yang telah ditetapkan oleh perusahaan ketika mereka memulai untuk atau mendaftar bekerja di sebuah perindustrian yang selalu memiliki peraturan-peraturan dan didalamnya juga mencantumkan hak-hak sebagai pekerja atau buruh untuk didapatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam perindustrian tersebut akan muncul sebuah organisasi-organisasi yang berpengaruh untuk merubah sebuah kondisi perusahaan ataupun mengembangkan sebuah kualitas yang lebih baik. Karena dalam bekerja di industri setiap orang akan bertemu dengan orang lain untuk pertama kalinya, dan dari situlah mereka membuat sebuah perkumpulan yang bisa membangun bangsa dan negara yang diinginkan masyarakat yaitu bangsa dan negara yang bisa mewujudkan setiap impian-impian masyarakat yang belum bisa tercapai dengan membangun negara yang bebas dan jauh dari sebuah konflik yang bisa membuat sebuah perpecahan.

Organisasi ini terbentuk dari masyarakat yang selalu hidup bersama-sama dalam sebuah lingkungan, manusia membentuk sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai seorang diri. Dan hanya bisa dilakukan atau diwujudkan dengan saling membantu antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Dari terbentuknya sebuah organisasi ini dapat membawa perubahan yang bisa membawa para buruh atau masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan hak-haknya yang kurang terpenuhi atau diperoleh sebelumnya.

Misalnya peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini adalah terjadinya aksi demontrasi yang dilakukan oleh para buruh dari berbagai oragnisasi yang ada di Jawa Timur yang menuntut sebuah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Regional yang dirasa kurang mencukupi untuk kehidupan para buruh. Terdapat banyak ribuan atau puluhan ribu buruh dari berbagai industri bergabung menjadi satu untuk mewujudkan apa yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipendam selama ini, dari terlahirnya sebuah organisasi tersebut maka mereka mampu untuk memulai aksinya dengan mengumpulkan semua organisasi lainnya dengan melakukan aliansi yang terbentuk dalam organisasi PPBS (Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo) untuk membahas dan merundingkan tentang permasalahan-permasalahan yang ada.

Gambar 3.3 Grebek pabrik, untuk menambah massa demontrasi

Permasalahan yang terjadi tentang kenaikkan Upah Minimum Regional ini misalnya, menjadikan hal ini sebuah gambaran tentang sebuah konflik yang ada dimasyarakat. Awalnya pembicaraan tentang tuntutan para buruh ini dilakukan baik-baik dengan para pihak perusahaan ataupun pihak pemerintahan, namun hasil yang para buruh itu dapat tidak membawa dampak yang bisa diselesaikan begitu saja. Akhirnya organisasi buruh ini melakukan aksi demontrasi untuk menuntut kebijakan pemerintah yang mengambil keputusan yang dirasa kurang bisa diterima oleh para pekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Demontrasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)

Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa beberapa kumpulan data di lapangan. Disini peneliti akan menjelaskan kategori data yang diperoleh, selain itu data dan fakta penelitian akan disusun dan diolah, yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Untuk itu peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama pendekatan dan jenis pendekatan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu melakukan pengamatan atas peristiwa yang terjadi baik berupa ucapan, perilaku, aktifitas, kejadian bahkan benda-benda guna untuk menemukan data. Dengan pendekatan fenomenologis ini, akan dapat memaparkan data secara nyata sesuai dengan fenomena yang ada tanpa ada yang direkayasa.

Sedangkan jenis penelitiannya adalah Kualitatif, yang nantinya akan menghasilkan data secara kualitatif. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah pengalaman manusia melalui deskriptif dari orang yang menjadi informan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami dan mengambil pengalaman hidup informannya.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan di oragnisasi FSPMI yang bertempat di desa Keboan Sikep kecamatan Gedangan Sidoarjo pada tanggal 19 April 2015 dan penelitian ini memperoleh data-data tentang organisasi FSPMI bertindak menanggapi aksi demontrasi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana FSPMI ini menyikapi kebijakan pemerintah provinsi tentang umr yang sedang terjadi dan sebab akibat yang terjadi setelah para pekerja melakukan demontrasi menuntut hak-haknya selama bekerja dalam sebuah perindustrian.

1. Proses aksi demontrasi buruh dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Propinsi tentang Upah Minimum Regional Kabupaten Sidoarjo.

   Aksi demontrasi merupakan salah tindakan yang akan terjadi ketika sebuah permasalahan-permasalahan yang timbul dilingkungan masyarakat tidak bisa dipecahkan secara kepala dingin atau tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Aksi-aksi ini selalu menimbulkan sebuah ketertarikkan tersendiri untuk dapat dilihat maupun dijadikan sebuah wacana dan bisa dijadikan sebuah pengalaman tersendiri bagi para pelaku yang mengikuti aksi-aksi dalam berdemontrasi ini.

Gambar 3.4 Organisasi FSPMI saat melakukan aksi demontrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, aksi demontrasi ini seringkali dijadikan sebagai topik perbincangan dikalangan masyarakat sekitar lingkungan kita. Namun disetiap perbincangannya tersebut bisa menimbulkan efek negatif maupun positif, karena aksi demontrasi ini merupakan konflik sosial yang sering kali terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dan disinilah peneliti mendapatkan pemahaman tentang sebuah proses demontrasi yang terjadi, yang timbul akibat dari permasalahan tentang kenaikan BBM yang secara tiba-tiba dan mengakibatkan para pekerja ingin meningkatkan Upah Mininum Regional agar sesuai dengan kondisi yang ada.

Aksi demontrasi ini bukan tanpa sebab tiba-tiba muncul tapi ada pemicunya, seperti ketika para buruh atau pekerja tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya selama bekerja, dan pihak perusahaan yang melanggar hak-hak yang sudah ditetapkan, tidak adanya rasa keadilan, lemahnya pengawasan dinas tenaga kerja tentang perubahan yang terjadi, lamanya proses pengadilan tentang hubungan industrial dan mahalnya biaya persidangan. Hal ini bukan sesuatu yang sepele untuk dikatakan, karena dari hal kecil sekalipun bisa berdampak besar apabila tidak diseslesai secara kekeluargaan. Penyebabnya muncul aksi demontrasi ini sebenarnya mereka hanya ingin memberitahu bahwa tidak selama buruh akan diam tentang ketidakadilan yang pihak perusahaan atau pihak pemerintah putuskan tentang peraturan-peraturan yang sudah diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demontrasi buruh yang sering kali terjadi di Indonesia ini sangatlah wajar, mereka hanya ingin menuntut haknya yang belum bisa terpenuhi oleh perusahaan sebagai buruh yang bekerja di lingkupnya. Maka dari itu sebelum melakukan demo para buruh ini merundingkan terlebih dahulu agar aksi yang akan berjalan ini sesuai dengan apa yang dituntutkan atau diharapkan, karena sebelum aksi ini terjadi mereka harus melalui sebuah proses agar bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu hasil yang memuaskan.

Proses aksi yang dilakukan oleh buruh ini harus bisa mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan agar bisa melangsungkan aksinya dalam menuntut kenaikkan upah minimum regional yang seharusnya mereka dapatkan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mbak Lusy, sebagai berikut:

> Proses terjadinya aksi demontrasi ini, tidak terlepas dari andilnya perusahaan. Karena apabila pihak perusahaan tidak memberikan ijin maka buruh tidak bisa melaksanakan aksi demontrasi, maka dari itu buruh harus membuat surat perijinan untuk bisa melakukan aksi demontrasi. Sebagaimana prosedur yang ada dalam sebuah perusahaan, karena kami tidak menginginkan produksi kita tertunda dengan adanya demontrasi buruh ini. Kami memberikan ijin ini hanya untuk aksi-aksi demontrasi bersifat nasional, apabila aksi tersebut hanyanya sebatas aksi-aksi kecil maka kami hanya memberikan ijin kepada beberapa buruh yang memiliki andil penting saja. Namun kami juga tidak bisa mengabaikan hak-hak yang mereka inginkan, sebab kami tidak bisa memaksakan kehendak.[35]

Sebelum terjadinya sebuah aksi ini, yang terpenting adalah melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan serikat buruh yang ada di

[35]Wawancara dengan Mbak Lusy Retno Sari. Pada tanggal 10 Agustus 2015. Pukul 19:00 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo sendiri untuk membahas tentang konsep apa yang akan dituntutkan, setelahnya baru melakukan lobi, dan aksi agar proses itu bisa berhasil. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan Pak Yusak, sebagai berikut :

> Proses demontrasi yang kita lalui banyak, mulai bulan Februari kita membuat suatu aliansi besar untuk menyamakan persepsi karena kita membutuhkan petak-petak yang mana di Sidoarjo sendiri memiliki 24 organisasi serikat buruh yang masih berjalan. Mulai bulan Februari tersebut kami merekrut mereka untuk menyamakan persepsi tentang tujuan Upah Minimum Kabupaten itu mau dibawa kemana?, nilai-nilai yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak itu seperti apa?, itu kita diskusikan. Karena bukan kita yang menentukan tetapi kita melalui musyawarah terlebih dahulu dalam PPBS (Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo) dengan terbentuknya aliansi-aliansi tersebut akhirnya komunikasi itu terjadi. Kami memiliki konten tentang kenaikkan Upah 30%, yang disana menjelaskan kenapa 30% dan sebagainya juga tentang kenaikkan BBM, kenapa harus naik lagi?. Apa buruh itu harus berdiam diri dadalam kamar kos dan apa buruh kalau malam harus hidup dengan satu bolam? Hal itu harus kita perbaiki, "Kebutuhan Hidup Layak" item yang harus kita perbaiki. Agar tercapailah targetan yang 30% itu. [36]

Itu adalah konsep awal yang Pak Yusak jelaskan tentang proses sebelum terjadinya sebuah lobi-lobi dengan pihak-pihak tertentu seperti dengan Bupati. Karena sangatlah penting bagi mereka untuk menyusun konsep, agar pembahasan maupun tuntutan yang para buruh minta ini bisa disetujui, akan tetapi bila para buruh ini tidak memiliki konsep yang jelas maka pihak-pihak yang berwenang tidak mau menerima tuntutan yang dirasa kurang mendasar itu. yang kemudian diungkapkan seperti berikut ini :

[36]Wawancara dengan Pak Yusak Daud Siloyn. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:23 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kita juga membuka jalur komunikasi dengan Bupati. Kami merundingkan konsep kita seperti apa terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah aksi. Yang menjelaskan tentang tuntutan dan dasar-dasarnya, seperti kenapa harus 2,2 juta karena nilainya harga sekian-sekian. Menuntut Upah Minimum Kabupaten 2,7 juta yang sebelumnya 2,1 juta. Setelah kita menjelaskan ternyata Bupati mengeluh "kenapa harus begitu besar tuntutannya?", loh ini bukan suatu hal yang harga mati. Contoh : perusahan kerupuk, apa dia harus membayar Upah Minimum Kabupaten, kan jelas mereka tidak akan mampu tapi Undang-Undang menjelaskan dia boleh menangguhkan, "buruh hari ini tidak bodoh" karena karena perusahaan besar pun bilang "loh bagaimana dengan pabrik yang kecil? Diakan jelas tidak mampu!. Ada aturan di Undang-undang untuk menangguhkan apabila perusahaan tersebut tidak mampu. Tapi bukan karena tidak mampunya perusahaan kecil kita menekan Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang besar. Akhirnya kita membuat konsep yang jelas dan Bupati sadar untuk menyetujui konsep tersebut dan membuat rekomendasi Bupati Sidoarjo untuk disahkan di Gubernur. Setelah konsep itu seduah disepakati bersama, barulah kita melakukan lobi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Bupati. Apabila lobi yang kita lakukan ini dirasa kurang bisa menemukan titik temu di antara keduanya, barulah kita melakuakn yang namanya proses ketiga yaitu aksi. Dengan cara menggerakkan aksi melalui demontrasi yang menjadi jalan terakhir untuk mendapatkan kesepakatan yang diinginkan.[37]

Setelah Pak Yusak menjelaskan tentang rician konsep yang dasar-dasar tuntutan yang diajukan, selanjutnya barulah masuk pada lobi yang dilakukan kepada pihak-pihak pemerintah, Bupati maupun lobi dengan Gubernur agar tuntutkan yang diajukan bisa disepakati, namun apabila kesepatakan itu tidak disetujui maka jalan yang akan ditempu adalah melakukan aksi demontrasi. Dan disana juga dijelaskan bahwa buruh tidak bodoh, karena buruh mengetahui dan tahu betul tentang undang-undang yang sudah tertulis.

[37]Ibid., 27 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal serupa juga sempat dituturkan oleh Mas Anam secara singkat, selaku ketua PUC FSPMI yang bekerja di PT. Parin dan sering terjun langsung ketika ada aksi demontrasi, proses demontrasi ini khususnya di FSPMI sendiri memiliki yang nama konsep, lobi dan aksi. Yang mana sebuah konsep harus bisa tersusun dengan jelas agar bisa diproses dengan baik dan disetujui. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan Mas Anam, sebagai berikut :

> Di FSPMI sendiri memiliki 3 proses sebelum terjadinya aksi demontrasi yaitu : Konsep, Lobi dan Aksi. Yang mana kami merencanakan tentang konsepnya terlebih dahulu, seperti : bagaimana Upah Minimum Regional itu harus bisa diharapkan sesuai dengan rasa keadilan dan sudah ada regulasi yang mengaturnya. Yang membahas tentang pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak, yang menginginkan penambahan pemenuhan kebutuhan agar bisa naik dan tidak itu-itu saja. Setelah konsep sudah jadi baru kita melakukan loby dengan dinas yang terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja yang diwakili oleh Dewan Pengupahan. Disini proses awal terjadinya demontrasi, apabila lobi-lobi yang dibicarakan tidak menemui titik temu, baru kita akan menekankan pada aksi. Karena melihat kondisi sosiologi yang ada di lingkungan Sidoarjo.[38]

Sebuah proses demontrasi ini memiliki yang nama konsep, lobi dan aksi yang sudah terstruktur di organisasi FSPMI. Dan tuntutan yang diinginkan ini pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak untuk bisa ditambahkan dan mendapatkan rasa keadilan. “Dan di Sidoarjo ini memiliki 24 Organisasi tingkat buruh yang masih aktif, bagaimana kita bisa menyatukan visi dan misi dalam menerapkan dan memperjuangkan

[38]Wawancara dengan Mas Anam. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 19:45 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UMR disetiap tahunnya".[39] Setelah melakukan persatuan visi dan misi ini terbentuk maka terjadilah aliansi yang terbentuk saat ini di PPBS (Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo) dan lewat inilah mereka melakukan aksi-aksi.

Ungkapan tersebut juga didukung oleh Pak Hendro, yang juga berpendapat tentang terjadinya sebuah proses aksi demontrasi yang harus dilalui dengan adanya Konsep, Loby dan Aksi. Seperti halnya hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Hendro, sebagai berikut :

> Sebuah proses demontrasi itu harus dikonsepkan terlebih dahulu dengan apa yang akan dituntutkan dan barulah kita melakukan lobi-lobi dengan pemerintahan. Akan tetapi, apabila lobi-lobi tersebut tidak dapat menemukan titik temu, barulah kita melakukan yang namanya aksi dengan cara demontrasi.[40]

Selain itu Pak Bambang berpendapat sedikit berbeda dengan lainnya, yang mengatakan bahwa prosesnya itu tergantung dengan isu yang menyebar dalam kalangan buruh dan bagaimana pihak-pihak yang terkait bisa melakukan lobi dengan pihak polisi untuk bisa mengawal aksi demontrasi tersebut. Walaupun inti yang dibicarakan akhirnya akan sama dengan konsep, loby dan aksi. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Bambang, sebagai berikut :

> Proses terjadinya demontrasi itu yang terpenting adalah adanya isu yang menyebar, seperti : berapa Upah Minimum Regional yang ditentukan menurut survey Kebutuhan Hidup Layak. Proses aksi itu kita koordinasikan kepada pimpinan dan seluruh anggota, trus mengirim surat pemberitahuan aksi (tinggal dimana

[39]Wawancara dengan Pak Wanto. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 20:11 wib. Di Rumah Rakyat.

[40]Wawancara dengan Pak Hendro. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:08 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> aksi tersebut berjalan) kayak aksi tingkat Kabupaten kita mengirimnya ke polres-polres tingkat Kabupaten, tapi kalau aksinya ke Pemerintahan Provinsi kita mengirim surat ke Polda Jawa Timur. Tuntutannya yaitu isu apa yang akan dibawa, sasaran, kumpul dimana, peralatan apa saja yang akan dibawa, terus menuju lokasi sasaran.[41]

Proses sebuah aksi demontrasi itu selalu tergantung dengan isu yang menyebar dari buruh yang satu dengan buruh yang lainnya, untuk bisa melangsungkan aksinya. Dan melakukan hal-hal yang perlu disiapkan untuk melakukan aksi demontrasi dengan melakukan lobi dengan pihak kepolisian untuk bisa mengawal berjalannya aksi demontrasi. Hasil wawancara saya dengan Mas danang yang sempat mengutarakan pendapatnya tentang proses yang memiliki pemahamana yang sama dengan informan lainnya, sebagai berikut : Tak beda dengan ungkapan yang lainnya, bahwa konsep, lobi dan aksi adalah sebuah proses yang akan dilakukan oleh para demontrans sebelum melakukan demontrasi yang terjun langsung ke lapangan dengan aliansi yang telah ditetapkan.[42]

[41]Wawancara dengan Pak Bambang. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 19:37 wib. Di Rumah Rakyat.

[42]Wawancara dengan Mas Danang. Pada tanggal 7 Mei 2015. Pukul 20:37 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.5 Demo yang bekerja sama dengan polisi

Konsep, lobi dan aksi ini adalah proses yang sudah ditetapkan dan akan dilakukan sebelum melakukan demontrasi, namun hal yang terpenting adalah dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk melakukan rakor. Seperti ungkapan dari Mas Narwoko yang mana di FSPMI ini sendiri sebagai bagian dokumenter. Yang selalu ikut andil dalam setiap demo yang dilakukan FSPMI, bahwa sebuah proses harus mengikuti struktur yang ada yaitu adanya konsep, lobi dan aksi. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mas Narwoko, sebagai berikut :

> Dalam FSPMI ini ada yang namanya KLA yaitu Konsep, Loby dan Aksi yang mana hal tersebut adalah sebagai sebuah proses demontrasi. Hal pertama tentu adalah konsep yang secara struktural FSPMI itu sendiri biasanya mengumpulkan para pimpinan wilayah yang menguasai propinsi di pusat untuk mengadakan rakor, tentang pembahasan konsep Upah Minimum Kabupaten ini akan seperti apa, seharusnya bagaimana, harus memiliki dasar seperti ini dan adanya sebuah inflasi, adanya perhitungan Upah Minimum Regional dan memiliki target seperti ini. Setelah konsep bisa dirundingkan antar sesama pimpinan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> anggota yang mengikuti rakor baru hasil yang diperoleh dari perundingan kita lobi kan dengan pemerintah ataupun gubernur untuk mendapatkan kata sepakat, dan apabila kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan baru hal ketiga tersebut muncul yaitu sebuah aksi. Aksi yang muncul dari para demontrasi ini hanya ntuk mendapatkan hak-hak yang belum bisa tercapai.[43]

Dalam sebuah demontrasi para pedemontrasi harus mengerti akan namanya proses agar tidak terjadinya "miss komunikasi" antar sesama aksi, agar bisa mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Hal ini ya ng membuat para demontrans mengungkapkan akan pentingnya sebuah proses demontrasi yang selalu dijadikan sebuah patokan untuk memulai aktivitas yang akan dilakukan. Proses ini disebut dengan Konsep, Loby dan Aksi (KLA).

Dalam perjuangan gerakan buruh maka FSPMI ini memperjuangkan isu utama yaitu upah layak, penolakan outsourcing, penggunaan PKWT sesuai dengan Undang-Undang dan ada perlindungan yang jelas, menguatkan fungsi pengawasan, jaminan sosial (social security), penguatan, pemberlakuan hak-hak dasar buruh seperti : jam kerja, lembur, cuti, bonus, dan pesangon melalui PKB yang berpihak pada buruh dan perlindungan bila terjadi PHK.

a. Upaya yang dilakukan para buruh untuk mendapatkan kebijakan dari Pemerintah tentang UMR

Dalam setiap tindakan yang terjadi dalam sebuah aksi demontrasi ini pasti akan adanya sebuah upaya yang akan dilakukan

[43]Wawancara dengan Mas Narwoko. Pada tanggal 7 Mei 2015. Pukul 19:56 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh para buruh untuk mendapatkan kebijakan dari Pemerintahan. Supaya tindakan yang akan para buruh lakukan ini tidak sia-sia begitu saja, melainkan mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan sebelum mereka berusaha terlebih dahulu. Selama ini organisasi FSPMI ini telah melakukan upaya untuk bisa memenuhi hak-haknya. Upaya yang dilakukan oleh para buruh ini tidak terlepas dari yang namanya proses yaitu konsep, lobi, dan aksi, yang mana para buruh ini langsung terjun kelapangan untuk bisa mensurvey harga-harga pasar dan menemukan hasil untuk menetapkan tuntutan yang pantas, dan inilah hasil wawancara saya dengan Pak Hendro, sebagai berikut :.

> Upaya itu sama dengan yang dibilang tadi tentang proses, kita menyiapkan dari awal yaitu isu tentang harga pasar. Misalnya kenaikkan Upah Minimum Regional terjadi pada bulan Oktober-November dan Desember sudah penetapan. Sebelum Bulan Oktober-November itu ada proses mau penetapan ke Desember, yaitu 3 bulan kebelakang itu kita melakukan survey lapangan harga-harga pasar, harga-harga kebutuhan pokok itu di survey terlebih dahulu, agar kita tahu yang layak untuk buruh itu berapa?, yang layak diperjuangkan buruh itu berapa? Jadi Upah Minimum Regional yang kita minta itu berdasarkan apa yang ada dilapangan dan tidak semata-mata kita meminta itu hanya untuk kebutuhan buruh lebih, tidak seperti itu dan buktinya buruh hidupnya pas-pasan sampai sekarang.[44]

Upaya tersebut itu adalah hal yang akan dilakukan oleh buruh yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan haknya, walaupun harus berkerja keras mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa menuntut upah yang sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan. Meskipun upaya yang dilakukan membutuhkan waktu yang tidaklah sebentar.

[44]Wawancara dengan Pak Hendro. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:08 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hal serupa juga dikatakan Pak Yusak tentang upaya yang dilakukan para buruh untuk meningkatkan kesetabilan pekerja dengan mengupayahkan kenaikkan Upah Minimum Regional ini dengan pembuktiannya yang nyata bukan "ilmu pokok e" yang dijadikan pengangan para buruh untuk meningkatkan Kebutuhan Hidup Layak yang sudah tertinggal jauh dengan standart internasional. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Yusak, sebagai berikut :

> Di FSPMI ini kita mempunyai 3 strategi. Strategi awal kita harus mempunyai "konsep" bukan "ilmu pokok e". Dikonsep tersebut Kebutuhan Hidup Layak yang awalnya 64 item dijadikan 84 item, padahal ILO (International Labour Organization) sendiri ada 120 item. Dan tahun ini kami masih mengupayakan untuk meningkatkan 84 item, untuk mendekati standart internasional. Baru dengan konsep yang jelas itu kita melakukan loby-loby ke pihak Pemerintahan, apabila konsep dan loby sudah sampai kepemerintahan daerah dengan clear, barulah kita melakukan loby dengan kepemerintahan propinsi. Kita duduk sama-sama dengan Pak Karwo supaya menghindari besok-besok ada aksi anarkis karena apabila buruh lapar kita susah untuk mengendalikannya juga.[45]

Upaya-upaya itu dilakukan untuk mempermudah langkah yang akan dilalui buruh, agar bisa memperjuangkan hak-hak yang dituntutkan kepada pemerintahan tentang Kebutuhan Hidup Layak yang kurang memuaskan buruh dan masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan buruh selama mereka bekerja.

Dan dari upaya-upaya tersebut barulah kita bisa mendapatkan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan tentang keputusan yang telah

[45]Wawancara dengan Pak Yusak Daud Siloyn. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:23 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil untuk bisa diterima oleh buruh. Karena kebijakan yang dilakukan bisa membuat dampak yang baik ataupun buruk bagi para buruh, tapi hal seperti ini tidak bisa dijadikan patokan untuk buruh bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak selamanya kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah atau perusahaan bisa membuat buruh senang, terkadang kebijakan yang telah diputuskan masih saja bisa merugikan buruh.

Seperti yang dikatakan Mas Danang bahwa "kebijakannya belum ada, karena akan adanya pemasukan rancangan atau pembuat peraturan daerah tentang ketenangakerjaan tingkat nasional yaitu penghapusan outshouching dan itupun masih lobi-lobi ditingkat perusahaan".[46] Dari hal tersebut maka diketahui bahwa kebijakan itu tidak selamanya bisa didapatkan dengan mudah, dan harus melalui perjuangan yang cukup melelahkan agar para buruh tersebut bisa mendapatkan apa yang telah dikehendakinya selama kebijakan tersebut dianggap layak untuk disepekati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pendapat tentang kebijakan ini pun diutarakan Mas Narwoko yang mengatakan bahwa kebijakan perusahaan sama dengan apa yang ada dipemerintahan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mas Narwoko, sebagai berikut :

> Kebijakan dari perusahaan ini apabila yang diminta bisa diterima dan teralisasikan maka kebijakan-kebijakan itu bisa didapatkan oleh buruh, tapi apabila buruh meminta dan tidak

[46]Wawancara dengan Mas Danang. Pada tanggal 7 Mei 2015. Pukul 20:37 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mendapatkan respon maka tidak adanya kebijakan apapun yang buruh peroleh dari perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintahan juga harus melakukan apa yang kita minta dari Upah Minimum Regional kenaikkan 35%. Pemerintahan harus bisa menyeimbangkan dari kurs ke rupiah agar seimbang, apabila memang kebijakan-kebijakan itu harus mencuat diawal seharusnya diutarakan saja kalau memang ada sangkut pautnya diakhir.[47]

Kebijakan dari pihak perusahaan itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk buruh bisa mendapatkan keadilan dari hak-haknya yang terampas, apabila pihak pemerintah sendiri juga belum mampu untuk memberikan kebijakan yang diinginkan buruh. Mas Anam pun mengatakan apa-apa saja yang telah diperoleh dari hasil demontrasi yang selama ini FSPMI lakukan untuk bisa medapakatkan hak-haknya juga apa yang diharapkan bisa diperoleh dengan cara yang baik dan tanpa harus melakukan hal-hal yang dapat merugikannya. Sebagaimana hasil wawancara saya lakukan dengan Mas Anam, sebagai berikut :

> Kebijakan-kebijakan yang telah kami terima selama ini, dengan gigih kami melakukannya agar hak-hak kami bisa terealisasikan dengan baik. Ada 2 kebijakan yang telah diterima, dari kebijakan tingkat nasional dan kebijakan dari tingkat daerah. Di tingkat nasional kami mendapatkan 1) BPJS kesehatan, didapat setelah kami melakukan mogok nasional. 2) PERMEN (Peraturan Menteri no 12 tahun 2012 tentang Outsourching). Dan di tingkat daerah kami mendapatka kebijakan 1) Rekomendasi dari Pemerintahan Provinsi untuk kenaikan KHL dari 60 item menjadi 84 item. 2) Rekomendasi buruh Jawa Timur menolak kenaikan BBM. 3) yang terakhir tentang UMK atau UMSK.[48]

Kebijakan-kebijakan tersebutlah yang selama ini telah diperoleh dari pemerintahan, tapi hal tersebut pun harus dilalui dengan usaha yang

[47]Wawancara dengan Mas Narwoko. Pada tanggal 7 Mei 2015. Pukul 19:56 wib. Di Rumah Rakyat.

[48]Wawancara dengan Mas Anam. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 19:45 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu keras juga dengan pengorbanan. Tanpa hal tersebut maka buruh tidak akan mendapat hak-haknya dengan tidak adanya kebijakan yang berlaku dikalangan buru atau belum bisa mendapatkan kebijakan yang pantas untuk mensejahterakan buruh. Namun hal lain juga sempat di utarakan oleh Pak Wanto yang membanggakan kinerja Gubernur, dengan mengatakan seperti ini. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Wanto, sebagai berikut :

> Kebijakan di Jawa Timur ini kita apresiasikan untuk Pak Karwo, Beliau satu-satunya Gubernur di Indonesia yang berani menyepakati semua tuntutan buruh, selama proses itu berjalan Pak Karwo tidak pernah berdebat lama selama kami mempunyai semua data dan dikasihkan oleh ahli hukum. 1) Gubernur pertama yang menyetujui BPJS. 2) kenaikkan Kebutuhan Hidup Layak dari 44 item menjadi 60 item hanya Pak Karwo. Siapa Gubernur yang hari ini meningkatkan Upah Minimum Kabupaten tertinggi di Indonesia hanya Pak Karwo, karena Jawa Timur naikknya 30%, sedangkan didaerah lain tidak ada yang naik sampai 30% seperti disini.[49]

Tak dapat disangka-sangka bahwa pihak Gubernur bisa merasakan apa yang dieluh-eluhkan oleh buruh dan mampu membantu buruh untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang buruh perjuangkan dengan selalu menyepakati yang buruh tuntukan, namun tuntutan tersebut haruslah jelas dan terdapat bukti nyata untuk menguatkan tuntutan tersebut.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dilapangan, peneliti menemukan beberapa fakta yang terjadi di dalam sebuah sebuah organisasi FSPMI yang melakukan aksi-aksi sebelum terjadinya sebuah aksi demontrasi yang mana para informannya memiliki berbeda-beda

[49]Wawancara dengan Pak Wanto. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 20:11 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat dalam menanggapi proses demontrasi. Walaupun terkadang pernyataan yang mereka ungkapkan ada yang berbeda-beda, namun memiliki inti yang hampir sama satu dengan lainnya. Yang mana mereka memiliki tujuan sama yaitu mendapatkan kata sepakat untuk menyetujui semua tuntutan yang diajukan dalam inti permasalahan sebuah aksi demontrasi itu berlangsung. Karena keberlangsungan yang dilakukan selama ini semata-mata hanya untuk mensejahterakan kehidupan buruh yang kurang layak, dan hal yang dapat dilakukan oleh para buruh ini yaitu harus bisa memperjuangkan hak-haknya selama bekerja, walapun harus melakukan aksi-aksi demontrasi.

2. Dampak yang terjadi setelah buruh melakukan demontrasi menuntut kebijakan dari Pemerintahan Propinsi tentang Upah Minimum Regional Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia ini pasti akan menimbulkan dampak yang berimbas kembali ke masyarakat itu sendiri, walaupun akhirnya dari permaslahan tersebut akan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif bagi penerimanya. Misalnya sebuah aksi demontrasi ini yang dianggap sebagai konflik sosial dari berbagai permasalahan yang ada dikehidupan masyarakat. Aksi demontrasi ini merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dengan mudah mencuat dikalangan masyarakat, karena hal itu selalu berdampak pada lingkungan. Walaupun terkadang membuat masyarakat merasakan dampak positif yang bisa mensejahterakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya, namun semua itu terkadang bisa membuat sebuah dampak negatif dilingkungan sekitar.

Seperti halnya yang terjadi dilingkungan kita selama ini, sering terjadinya sebuah aksi demontrasi yang dilakukan oleh para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya selama bekerja diperindustrian. Maka dari itu pihak perusahaan sering mendapatkan dampak dari sebuah aksi demontrasi tersebut, tapi dampak itu bisa jadi menjadi ketakutan tersendiri apabila pihak perusahaan tersebut melakukan hal-hal yang dirasa kurang benar. Bilamana dampak-dampak dari tuntutan itu tidak benar-benar di persiapkan oleh pihak yang memiliki wewenang tinggi dalam sebuah struktur perusahaan.

Pihak perusahaan sulit untuk menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun dari keputusan tersebut pihak perusahaan akan menjalankan apa yang telah ditetapkan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mbak Lusy, sebagai berikut :

> Kami merasakan dampak dari aksi demontrasi yang telah dilakukakan oleh para buruh, tapi harus bagaimana lagi "ini sangat merugikan bagi perusahaan". Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak mungkin untuk dilanggarkan, jadi kami berusaha memenuhi apa yang diinginkan buruh. Tetapi kami juga mempunyai hak untuk menetapkan keputusan apa yang terjadi dari kenaikkan upah minimum regional ini, karena pimpinan menginginkan timbal balik dari apa yang telah terjadi. Dengan meningkatkan kinerja para buruh untuk bisa menambah produksivitas dan melakukan pengurangan karyawan untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan.[50]

[50]Wawancara dengan Mbak Lusy Retno Sari. Pada tanggal 10 Agustus 2015. Pukul 19:00 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak yang dirasakan oleh pihak perusahaan tersebut dikatakan sangat merugikan, namun pihak perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa darri apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan akan tetap menjalankannya. Namun pihak perusahaan menginginkan hal yang bisa menguntungkannya juga, dengan membuat buruh untuk bisa meningkatkan penghasilan dari produktivitasnya dan melakukan pengurangan karyawan.

Namun dari dampak itu kedua belah pihak memiliki keuntungan dan kerugian yang sama apabila keduanya tidak bisa melakukan hal yang adil selama menjalan tim produksinya. Dampak tersebut sebenarnya tidak akan terjadi apabila mereka bisa menjalaninya dengan benar dan tidak membuat kecurangan didalamnya. Dan dampak dari demontrasi ini sebenarnya tidak ada, namun memiliki efek samping bagi karyawan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Hendro, sebagai berikut :

> Dampak yang terjadi dari demontrasi di tahun 2014 kemarin, tentang kenaikkan Upah Minimum Regional yang awalnya 2.190.000 ke 2.705.000 itu tidak ada masalah jadi dampak demontrasi itu tidak ada. Tetapi berefek pada perusahaan-perusahaan, karena bagaimana perusahaan itu bisa sinergik dengan efisiensi-efisiensi karyawan lagi apabila perusahaan-perusahaan tersebut belum siap dengan keputusan yang pemerintah keluarkan. Jadi dampak yang terjadi dari aksi itu tidak ada, karena dampaknya itu mengarah ke perburuhan di perusahaan-perusahaan dengan melakukan PHK atau pengurangan karyawan.[51]

Hasil yang diperoleh dari demontrasi ini bisa dibilang memuaskan buruh, karena upah buruh bisa naik hampir 30%. Namun hal yang tidak

[51]Wawancara dengan Pak Hendro. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:08 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyenangkan dari hasil yang ditetapkan ini pihak perusahaan harus melakukan PHK atau pengurangan karyawan untuk bisa menstabilkan keuangan yang ada diperusahaan, karena bisa dibilang pihak perusahaan belum mampu menerima keputusan yang telah ditetapkan.

Penuturan yang sama pun terlontar dari Mas Danang yang mengatakan bahwa pihak perusahan dan buruh ini bisa dibilang mendapatkan dampak yang menguntungkan dan merugikan, karena dampak yang diterima tidak selalu menguntung keduanya namun salah satunya. Sebagaimna hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mas Danang, sebagai berikut :

> Dampak yang diterima dari demontrasi kenaikkan Upah Minimum Regional ini sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat berdampak bagi buruh dan perusahaan sendiri. Bagi perusahaan kenaikkan Upah Minimum Regional ini bisa dikatakan menguntungkan juga merugikan mereka, karena perusahaan sendiri akan merasa terbebani dengan keputusan yang telah ditetapkan untuk Upah Minimum Regional tahun ini dan akan melakukan tindakan pengurangan karyawan untuk menutup kerugian perusahaan dengan adanya kenaikkan Upah Minimum Regional. Dan hal menguntungkannya ini buruh bisa mendapatkan hak-haknya yang selama ini dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.[52]

Jadi hasil dari aksi demontrasi ini berdampak pada perusahaan yang membahayakan para pekerja, dengan adanya pengurangan karyawan. Namun hal ini bisa dipahami kalau saja karyawan tersebut bisa mengerti tentang hak-hak yang mereka perjuangkan, walaupun mereka mendapatkan imbas dari demontrasi tersebut akan tetapi mereka juga menyelamatkan para buruh lainnya yang telah memperjuangkan

[52]Wawancara dengan Mas Danang. Pada tanggal 7 Mei 2015. Pukul 20:37 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-haknya untuk para buruh lainnya. Karena rejeki itu sudah ada yang mengatur dan kita hanya akan memperjuangkan juga menerima dengan menjalani agar bisa bermanfaat.

Lain halnya dengan Pak Yusak yang berpendapat tentang dampak positif yang akan dirasakan oleh para buruh, walaupun begitu aksi yang mereka lakukan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumya, karena dampak demontrasi ini bisa merubah jalannya sebuah pikiran masyarakat untuk tidak melakukan urbanisasi kekota-kota lainnya kalau hanya ingin mendapatkan upah yang tinggi. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Yusak, sebagai berikut :

> Dampaknya setelah aksi demontrasi ini, masih ada buruh yang kurang memahami, misalnya kenapa Upah Minimum Kabupaten setinggi itu? Nanti perusahaan kalau tidak bisa bayar tutup, dan berpindah ke daerah yang terpencil. Kebetulan di FSPMI kita memiliki program jangka panjang yang luar biasa, kita sebetulnya sepakat dengan rencana pelaksanaan pemerataan pembangunan luar daerah dengan besar Upah Minimum Regional, otomatis perusahaan kecil berpindah ke daerah-daerah kecil yang Upah Minimum Kabupaten kecil. 1) secara otomatis berpindahnya pabrik-pabrik kecil ini akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, 2) infrastruktur akan mengikuti ia, misalnya pembangunan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit dan lain-lain akan mengikutinya, 3) dia bisa menahan laju urbanisasi dengan melakukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten. Kenapa bisa begitu?? Karena jelas “orang-orang sekitar tidak perlu pergi ke DKI, dia cukup di Surabaya sudah menikmati Upah Minimum Kabupaten yang sama”. Dampaknya ini lebih banyak memiliki efek baiknya daripada buruknya. Orang bisa kembali ke daerahnya dengan pendapatan penuh di daerah tanpa perlu melakukan urbanisasi. Kalau bukan buruh yang bergerak dengan melakukan demo besar-besaran, apa mungkin terjadi pembangunan-pembangunan di daerah-daerah dan tidak hal itu tidak pernah terlintas oleh pemerintah. Dan sekali lagi dampaknya itu diburuh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mereka merasa nyaman di daerah mereka masing-masing tanpa harus mengadu nasib ke daerah lain.[53]

Jadi disini Pak Yusak menjelaskan bahwa apabila konsep yang telah dibuat sebelumnya itu bisa memiliki dampak panjang, apabila dipahami secara benar-benar. Karena aksi demontrasi yang dilakukan ini agar bisa mensejahterakan para buruh, walaupun sebagian akan merasakan dampak negatif dengan cara harus dikeluarkan dari perusahaan atau PHK. Tapi hal tersebut hanyalah dampak negatif kecil yang mereka rasakan, dan akan berdampak lebih besar pada kehidupan para buruh lainnya. Karena mereka sudah memahami bahwa setiap tindakan yang mereka perbuat pasti mereka akan mendapat konsekuensi dari apa yang telah diperbuat. Dan bisa membuat masyarakat menyadari bahwa tidak selama merantau akan mendapatkan upah besar, karena dikampung halaman sendiri bisa merasakan upah yang besar dan bedanya tipis dengan upah kota lain.

Sama halnya dengan Pak Yusak yang mengatakan tentang dampak positif yang dirasakan para buruh, Pak Bambang juga berpendapat tentang dampak positifnya saja dari hasil aksi demontrasi yang telah dilakukannya. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Bambang, sebagai berikut :

> Para buruh ini mendapatkan dampak baik dengan hampir mendapatkan kenaikkan Upah Minimum Kabupaten 27% yang setara dengan kenaikkan 600.000 sampai 700.000. dari hasil aksi

[53]Wawancara dengan Pak Yusak Daud Siloyn. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:23 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> demontrasi menuntut kenaikkan Upah Minimum Regional dari upah yang sebelumnya.[54]

Dampak yang dirasakan ini sangat berimbas bagi buruh untuk bisa meningkatkan ataupun bisa membuat kemerosotan yang bisa merugikan satu sama lainnya, namun apa yang telah dirasakan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Regional ini para buruh bisa bernafas lega karena hasil yang diperoleh dapat meningkatkan kebutuhan hidup yang semakin melonjaknya kebutuhan pokok. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Wanto, sebagai berikut :

> Dampak yang dirasakan dari demontrasi itu sebenarnya tidak ada, apabila hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja bisa berjalan dengan baik dan selalu mengedepankan konsep. Agar tidak adanya sanksi yang didapat oleh para pekerja yang melakukan aksi demontrasi ini. Karena dampak demontrasi ini biasanya bisa membahayakan para buruh, karena tidak adanya komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. [55]

Sebagai pengusaha seharusnya bisa menjamin dan bisa memegang janji-janji yang telah ditetapkan diperusahaannya, agar para buruh bisa merasakan dampak yang baik bagi kelangsungan hidupnya. Walau pun tak semua perusahaan bersifat sama namun apabila hubungan bisa dibangun dengan baik maka pihak perusahaan ataupun buruh bisa merasakan dampak yang bisa menguntungkan satu sama lainnya.

Dampak demo ini tidak selalu mengarahkan buruh pada tindak anarkis apabila keputusan yang dibuat bisa dilaksanakan oleh pihak

---

[54]Wawancara dengan Pak Bambang. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 19:37 wib. Di Rumah Rakyat.

[55]Wawancara dengan Pak Wanto. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 20:11 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahan.[56] Dengan kata lain, para pihak-pihak yang bersangkutan mampu membuat keputusan seadil-adilnya tanpa harus memandang bulu tentang status ataupun kinerja buruh. Dan penuturan lain pun terlontar dari Mas Anam yang mengatakan tentang struktur yang ada dalam sebuah organisasi FSPMI. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mas Anam, sebagai berikut :

> Dalam FSPMI ini terdapat yang namanya Konsulan Cabang (KC), Pimpinan Cabang (PC), terus diperusahaan sendiri ada yang namanya Pimpinan Unit Kerja (PUK), dan disinilah isu-isu dari perburuhan itu kita hembuskan. Dan di Konsulan Cabang sendiri ini masih dibawahi beberapa cabang lainnya, dari hal yang telah disebut tersebut masih ada yang lebih berkuasa yaitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Di Sidoarjo sendiri khususnya FSPMI ada yang namanya PCSPL dan PCAI, dan dari itu semua kita saling sharing-sharing tentang loby yang sebelumnya dilakukan. Maka dari itu muncullah intruksi untuk kegiatan aksi, dan intruksi ini ditujukan ke PUK dan dari PUK diteruskan lagi ketingkat yang paling bawah yaitu tingkat perusahaan. Karena FSPMI ini organisasi penggerak massa dan yang terpenting disini adalah Garda Metal, itu salah satu pilar FSMPI.[57] Dan ingin dampak dari demontrasi tersebut bisa menambahkan jumlah KHL yang dituntutkan tanpa mengurangi dan memilah-milah untuk bisa mendapatkan kualitas dari dari KHL bisa naik dari konsep yang sudah daftar dan disurvey dilapangan.

Para buruh ini juga kurang mengerti dengan pengusaha yang cari untung di Indonesia tapi mereka juga membencinya karena dari keuntungan yang pengusaha dapat tersebut menekan buruh untuk tidak sejahtera. Apa bedanya buruh yang sekarang bekerja besok gali lubang tutup lubang lagi dengan perbudakan zaman dahulu, zaman dahulu orang

[56]Wawancara dengan Mas Narwoko. Pada tanggal 7 Mei 2015. Pukul 19:56 wib. Di Rumah Rakyat.

[57]Wawancara dengan Mas Anam. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 19:45 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja dikasih makan setelah selesai makan besok pagi bisa lanjut kerja lagi untuk pengusaha itu dan akan begitu seterusnya.

Upah buruh hari ini, di Indonesia masih jauh dari seharusnya. Upah buruh UMK sekarang hanya ditujukan kepada buruh lajang saja, apakah ada undang-undang yang mengatakan bahwa buruh itu tidak boleh menikah dan ternyata di Indonesia ini ada.

a. Tanggapan perusahaan dengan adanya aksi demontrasi buruh untuk menuntut kenaikkan Upah Minimum Regional

Setiap permasalahan yang terjadi pasti akan ada sebuah dampak yang akan berimbas pada akhirnya, itu pula yang dirasakan oleh setiap perusahaan. Apabila perusahaan menimbulkan permasalahan dengan karyawannya pasti akan timbul adanya sebuah aksi demontrasi tersebut untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja. Misalnya dengan permasalahan kenaikkan BBM yang terjadi pada akhir tahun 2014 kemarin, para buruh ini menginginkan juga kenaikkan upah yang lebih besar dari sebelumnya, karena dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya kenaikkan BBM tersebut.

Pada akhirnya buruh tersebut memulai aksinya untuk bisa meningkatkan upah mereka, agar setara dengan jumlah kenaikkan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Setelah melakukan demontrasi, para buruh ini pasti akan mendapatkan sebuah keputusan dari hasil demo tersebut. Dari hasil tersebutlah perusahaan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hak-hak buruh, akan tetapi pihak perusahaan juga akan mendapatkan dampak dari demo yang bisa merugikan perusahaannya.

Dan inilah beberapa tanggapan perusahaan yang diutarakan oleh para informan kepada peneliti yang mewawancarai. Yang mana pihak perusahaan merasakan kerugian dari kenaikkan Upah Minimum Regional yang sudah ditetapkan dan memberikan sebuah gambaran tentang kondisi perusahaan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengang Pak Hendro, sebagai berikut :

> Tanggapan perusahaan "mereka akan merasa merugi", karena kalau satu sisi perusahaan yang semua itu enjoy dengan kesalahan-kesalahannya terus buruh itu ngerti hingga terjadi suatu aksi demontrasi, akhirnya perusahaan akan memberikan apa yang menjadi hak karyawannya kan?? Hal seperti itu membuat perusahaan secara otomatis merasa merugi. Contoh : kebanyakan perusahaan tersebut selalu berbuat curang atau nakal, dalam artian konteks upah dibawa Upah Minimum Kabupaten. Selama buruh itu bisa dinina bobokkan dengan berangkat pagi, kerja overtime, pulang, istirahat dan tidur, terus seperti itu kegiatan sehari-harinya, itu kan yang dimaksud di nina bobokkan. Sehingga dia (buruh) dibodohkan dan dibutakan yang dalam artian jangan sampai kamu ngerti tentang Upah Minimum Kabupaten, lah itu trik perusahaan sehingga pada saat buruh itu menginginkan wadah untuk mengetahui tentang suatu peraturan dia tidak mengetahuinya.[58]

Perusahaan akan merasakan kerugian besar, karena keuntungan-keuntungan yang selama ini mereka peroleh akan dibagiakn kepada buruh. Kalaupun selama ini pengusaha bisa berbuat curang dengan menutupi kebenaran hasil Upah Minimum Kabupaten sebelumnya dengan memberikan gaji yang tak sepantasnya mereka dapatkan dan membodoh-bodohi buruh tentang masalah tersebut, maka imbasnya

[58]Wawancara dengan Pak Hendro. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:08 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan pengusaha itu rasakan dikemudian hari akrena para buruh sekarang tidak bodoh dan akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan hak-hak yang terampas oleh pihak-pihak tertentu. Walaupun harus melakukan aksi-aksi yang harus dilakukan berhari-hari sekalipun, karena buruh hari sudah sangat berkembang. Contohnya saja di FSPMI sendiri ada yang namanya kajian yang membuat para buruh mengerti dan tidak akan bisa tertindas seperti sebelum-sebelumnya yang mengetahui apa-apa.

Sama halnya dengan Pak Hendro katakan tentang dampak negatif yang akan dirasakan perusahaan, hal serupa juga sempat dikatakan oleh Mas Anam yang berpendapat bahwa pihak perusahaan menolak adanya demontrasi, karena akan menganggu jalannya produksi atau pekerjaan yang dikerjakan dan dapat mengurangi tingkat perolehan target produksi. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mas Anam, sebagai berikut :

> Tanggapannya pihak perusahaan menolak dengan adanya aksi demontrasi tersebut, karena akan berdampak pada perusahaan dengan menganggu aktifitas produksi yang selama ini berjalan. Dan demo menuntut kenaikkan upah ini bila diterapkan di perusahaan maka perusahaan akan merasa merugi karena biaya produksi akan berkurang.[59]

Perusahaan yang menolak adanya aksi demontrasi ini, membuktikan bahwa pihak perusahaan tidak memberikan buruhnya untuk bisa mengapreasikan pendapat yang dielu-elukan selama bekerja. Pendapat lain juga dijelaskan oleh Pak Bambang yang

[59]Wawancara dengan Mas Anam. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 19:45 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa tanggapan yang diberikan perusahaan tersebut ada yang baik dan buruk tentang aksi demontrasi buruh. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Bambang, sebagai berikut :

> Tanggapan perusahaan itu ada yang baik dan buruk. Tanggapan baiknya adalah untuk menekan kepada perusahaan-perusahaan agar bisa cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat pemerintah dan menolak kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum pekerja atau buruh. Sebenarnya tanggapannya itu tidak baik buruknya karena kita yang merubah lebih baik, tapi pemerintah masih saja membuat peraturan seenaknya sendiri. Maka dari itulah buruh melakukan aksi demontrasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan yang timbul.[60]

Tanggapan yang diberikan bisa membangun dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan para buruh berharap kebijakan-kebijakan yang merugikan bisa dihilangkan. Juga tanggapan yang masuk ini tergantung dari bagaimana buruh bisa merubahnya agar menjadi lebih baik.

Selain itu pendapat yang lain juga muncul ketika Pak Yusak mengatakan bahwa pihak perusahaan akan memberikan izin para buruhnya untuk melakukan demo apabila pihak perusahaan dan para pekerja bisa menjaga hak masing-masing juga tidak merugikan para pekerjanya. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Yusak, sebagai berikut :

> Kebetulan saya diperusahaan sana serikat buruh, kalau menegenai masalah demo. Selama perusahaan dan pekerja itu bisa menjaga haknya masing-masing, maka serikat mempunyai

[60]Wawancara dengan Pak Bambang. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 19:37 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hak untuk melakukan demontrasi mengemukakan pendapatnya untuk kenaikkan kebutuhan hidup mereka tetapi perusahaan juga mempunyai haknya untuk melakukan produksi untuk keberlangsungan teman-teman bekerja. Kita saling menghargai hubungan dengan pihak-pihak lainnya. Akan tetapi kalau berbicara secara global di Sidoarjo ini masih kurang adanya pemahaman tentang buruh, sebetulnya buruh demontrasi tidak untuk merugikan perusahaan. Kita ini buka orang-orang bodoh yang punya konsep ngawur, kita tau kok kalau dolar hari ini naik karena prospek yang kita keluarkan dari fakta yang ada dan itu secara otomatis tapi perusahaan besar banyak yang menekan kalau hari saya untung 10% maka tahun depan saya harus untung 15%, lah ini yang bertentangan dan dampak-dampak yang sangat tidak berpendidikan apabila perusahaan selalu beranggapan untuk menekan pekerjanya untuk selalu meningkat keuntungannya sendiri.[61]

Tanggapan ini terlontar dari Mbak Lusy yang mengatakan bahwa dalam aksi demontrasi ini pihak perusahaan merasa keberatan, namun pihak perusahaan pun tidak bisa mengelak akan aksi demontrasi ini. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mbak Lusi :

> Pihak perusahaan akan merasakan dampak dari aksi demontrasi buruh ini, maka dari itu perusahaan sebenarnya merasa keberatan dengan adanya aksi tersebut. Namun apabila pihak perusahaan tidak mengijinkan para buruh melakukan aksi demontrasi ini, maka buruh akan melakukan tindakan yang tidak terduga atau bisa-bisa mendemo perusahaan sendiri dan akan merusak fasilitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan tidak bisa mengelak adanya demontrasi buruh ini dan di dalam undang-undangkan juga sudah dijelaskan bahwa demontrasi itu adalah hak masyarakat untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Dan disini pihak perusahaan memberikan ijin dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yang mana antara buruh dan pihak perusahaan bisa memberikan tanggung jawab akan kewajibannya.[62]

---

[61]Wawancara dengan Pak Yusak Daud Siloyn. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:23 wib. Di Rumah Rakyat.

[62]Wawancara dengan Mbak Lusy Retno Sari. Pada tanggal 10 Agustus 2015. Pukul 19:00 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggapan yang dikatakan oleh pihak perusahaan merupakan sebuah keputusan yang bisa membawa sebuah perubahan dari sisi buruh maupun puhak perusahaan, karena dengan keputusan tersebut dapat membawa perubahan dari segi buruh maupun perusahaan setelah aksi demontrasi tersebut membawa keputusan dari pihak pemerintah tentang kenaikkan upah minimum regional yang dituntutkan. Walaupun sebenarnya pihak perusahaan tidak menginginkan adanya aksi demontrasi tersebut ada dalam perusahaannya.

Dari tanggapan-tanggapan yang dikatakan tersebut ada yang berdampak baik dan adapula yang buruk, dan diketahui bahwa terdapat tanggapan yang mangatakan bahwa pihak perusahaan merasakan kerugian dengan adanya demontrasi buruh yang menginginkan kenaikkan UMR. Kerugian-kerugian yang dirasakan perusahaan ini bisa mengakibatkan efek yang tidak menyenangkan dan berakibat sangat fatal bagi buruh, namun hal tersebut bisa dibilang membuat kesejahteraan baru bagi buruh yang lainnya agar bisa mendapatkan sesuatu yang seharusnya walaupun harus mengorbankan yang lainnya karena apapun yang dilakukan pasti ada konsekuensi tersendiri didalamnya.

Perusahaan-perusahaan yang selama ini bisa berbuat curang terhadap buruhnya sekarang harus berhati-hati dengan tindakan yang seperti itu, karena buruh sekarang tidaklah bodoh dengan aturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang bisa merugikan mereka. Banyak kegiatan-kegiatan yang buruh lakukan untuk bisa mendapatkan hak-haknya seperti yang FSPMI lakukan dengan mengadakan pengakajian-pengkajian tentang hak-hak buruh atau semacamnya, untuk membangun buruh agar tidak bisa diam saja disaat perusahaan berusaha membodoh-bodohi dan mengatakan pendapatnya apabila dirasa mereka merasa dirugikan oleh perusahaan karena negara ini adalah negara demontrasi yang bisa mengutarakan pendapat-pendapatnya untuk bisa dipertimbangkan.

Demontrasi yang dilakukan para buruh ini akhirnya bisa membuahkan hasil yang dirasa bisa memberikan kemajuan untuk kebutuhannya kedepan dengan ketetapan yang telah diputuskan oleh pemerintahan tentang kenaikkan UMR yang selama ini sangat berdampak bagi perusahaan. Yang mana para buruh yang sering terjun langsung kelapangan untuk melakukan aksi-aksinya dan meninggalkan pekerjaannya yang ada diperusahaan, namun hal itu bisa dilakukan apabila pihak perusahaan memberikan ijinnya dan bisa menghargainya yang namanya demokrasi.

Dengan adanya kenaikkan UMR yang saat ini menjadi perdebatan dikalangan pengusaha, mereka bisa terima dengan kenaikkan UMR yang bisa menjadikan kerugian yang awal bagi perusahaan yang kurang mampu memberikan upahnya untuk buruh. Ungkapan keberatan pun terlontar dari pendapat Mas Danang dan Pak Bambang yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beban. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Mas Danang, sebagai berikut :

> Iya pasti pihak perusahaan merasa keberatan dengan adanya kenaikkan Upah Minimum Regional ini, karena perusahaan akan memiliki beban baru untuk menaikkan upah buruh dengan apa yang telah ditetapkan dan akan mendapatkan dampak yang berbeda dalam menyikapi kenaikkan Upah Minimum Regional tersebut.[63]

Ungkapan yang sama pun dilontarkan oleh Pak Bambang tentang keberatannya pihak perusahaan terhadap kenaikkan Upah Minimum Regional ini. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan Pak Bambang, sebagai berikut :

> Iya, tetapi Upah Minimum Regional itukan hak wajib para pekerja. Jadi bilamana perusahaan tidak mampu membayar Upah Minimum Regional yang telah ditetapkan, maka perusahaan melakukan penangguhan upah.[64]

Keberatan yang dikatakan perusahaan ini, bisa menjadi tonggak bagi buruh. Namun apabila perusahaan mengerti dengan kenyataan yang ada dan aturan yang ada, maka upah yang akan diberikan akan sesuai. Apabila pihak perusahaan tidak bisa melakukannya seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang, maka pihak perusahaan bisa mengatasinya dengan penangguhan upah. Yang mana penangguhan upah disini apabila pihak perusahaan tidak bisa membayar upah selama 3 bulan penangguhan, maka 3 bulan tersebut nantinya akan

[63]Wawancara dengan Mas Danang. Pada tanggal 7 Mei 2015. Pukul 20:37 wib. Di Rumah Rakyat.

[64]Wawancara dengan Pak Bambang. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 19:37 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk upah Upah Minimum Regional yang sudah ditetapkan bulan setelah penangguhan upah tersebut.

Pendapat yang dikatakan Pak Wanto ini lebih mengarah pada jalan damai atau tenang akan tetapi memiliki resiko yang akan ditanggungnya kemudian hari. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Wanto, sebagai berikut :

> Semua itu tergantung pada perusahaannya masing-masing, apabila perusahaan itu pintar dalam mengatasi hal-hal yang menyangkut kenaikkan Upah Minimum Regional ini maka tidak ada masalah. Contoh perusahaan itu berproduksi dalam bidang engineer tapi di eksport. Kalau seandainya eksport ini tidak sampai naik dan memenuhi dalam bulan ini, maka perusahaan itu akan mendapatkan cas customer jadi daripada dikasihkan kepada customer lebih baik dikasih ke buruhnya saja. Dari hal itu maka terlihat bahwa perusahaan tersebut damai dan tidak ada yang namanya demontrasi, kiriman lancar. Itu kalau perusahaan tersebut pintar, akan tetapi biasanya perusahaan itu sukanya membodohi buruhnya.[65]

Hal tersebut bisa menguntungkan dan merugikan perusahaan maupun buruh itu sendiri, namun tindakan tersebut sangat-sangat tidak bisa diambil contoh yang baik karena lebih mementingkan dirinya sendiri. Kalau saja perusahaan itu bisa jeli dan produksinya itu benar-benar menghasilkan produk yang baik, dan sesuai target juga tepat dengan waktunya. Maka perusahaan tersebut tidak mau kehilangan yang namanya customer tetapi juga berani mengeluarkan uang untuk membayar para buruh.

Akan tetapi pendapat lain muncul dari Pak Yusak yang mengatakan rasa keberatannya pihak perusahaan akan kenaikkan

[65]Wawancara dengan Pak Wanto. Pada tanggal 19 April 2015. Pukul 20:11 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah Minimum Regional yang sudah ditetapkan, juga menyadarkan tentang kesadaran akan loyalitas terhadap perusahaan. Dan tidak bersifat seakan-akan buruh adalah alat yang bisa digunakan sebagai pencetak uang. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Yusak, sebagai berikut :

> Rata-rata semua perusahaan tidak merasa keberatan karena nilai sektoral dari kenaikkan Upah Minimum Regional 10%. Yang mereka kejar kalau terdapat kenaikkan upah yaitu dengan meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya kenaikkan upah maka buruh akan merasa memiliki dan dia akan berfikir untuk bisa mengembangkannya dan berfikir tidak akan merusak aset perusahaan melainkan akan menjaganya supaya bisa berjalan lancar. Kalau dikatakan pelit mungkin mereka tidak menyadari hal itu, mereka berusaha untuk menekan harga untuk mendapatkan untung. Buruh disini tidak pernah merasakan rugi. Buruh sepakat kalau pengusaha itu harus kaya karena mereka yang memiliki modal tapi tidak lantas dengan kayanya pengusaha dia menindas buruh. Buruh sadar kalau pengusaha itu punya uang, karena dia harus membayar karyawannya dan pengusaha harus benar-benar kaya tapi tidak harus membodohi buruh dengan menjadikan buruh sebagai mesin pencetak uangnya.[66]

Dalam hal ini pengusaha benar-benar melakukan tindakan yang bisa membuat buruh merasa terbebani, karena tindakan yang pengusaha tersebut lakukan. Namun tidak lantas buruh akan diam saja melihat hal tersebut terjadi, akan tetapi buruh akan bertindak lebih apabila sampai-sampai pihak pengusaha melakukan tindakan tersebut. Karena antara buruh dan pengusaha ini sangat berkaitan satu sama lain yang saling membutuhkan untuk mencukkupi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Yang mana hal tersebut selalu menjadi satu

[66]Wawancara dengan Pak Yusak Daud Siloyn. Pada tanggal 27 April 2015. Pukul 20:23 wib. Di Rumah Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan yang harus dijaga dengan baik, namun apabila pengusaha tersebut sampai menekan, membodohi buruh maka tindakan tersebut benar-benar harus ditindaklanjuti sebagai tindakan yang harus dihilangkan juga diberikan pelajaran.

Demontrasi yang dilakukan oleh buruh ini hal yang wajar untuk bisa mendapat haknya sebagai pekerja, agar bisa menuntut kenaikkan upah yang diharapkan. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Budi, sebagai berikut :

> Aksi demontrasi buruh yang menuntut kenaikkan Upah Minimum Regional yang terjadi pada tahun 2014 ini bukanlah kali pertama, jadi kami menanggapinya dengan santai dan kami selalu mendengarkan keluhan-keluhan yang di utarakan oleh para buruh. Akan tetapi apabila para pendemo tersebut bisa berjalan dengan tidak anarkis, karena kami tidak menginginkan tindakan-tindakan yang bisa membuat kacau jalannya aksi demontrasi. Kami memberikan akses untuk buruh melakukan musyawarah dengan pihak Dinas Tenaga Kerja untuk bisa merundingkan tuntutan yang mereka ajukan, karena inilah hak mereka yang harus bisa dipenuhi. Namun aksi demontrasi yang dilakukan ini merupakan hal yang wajar dilakukan, karena demontrasi ini adalah bentuk penyampaian pendapat mereka yang tidak mendapakatkan rasa ketidakadilan dan hak-hak mereka sebagai buruh. Dan kami disini juga memberikan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, dengan merundingkan hasil yang telah di ajukan buruh dalam lobi-lobinya sebelum merka melakukan aksi demontrasi buruh ini. Jadi hasil tuntutan yang buruh ajukan ini kami sharing lagi agar sesuai dengan pertimbangan yang telah kami putuskan, dan disini buruh harus bisa menyepakati hasil yang telah kami ajukan dibawa ke pihak Gubernur untuk dipertimbangkan lagi juga diputuskan hasil Upah Minimum Kabupaten ini layaknya seberapa dan sesuai dengan hasil survey kebutuhan pokok yang telah diperhitungkan. Karena hasil tuntutan itu harus jelas dan sesuai dengan kenyataan.[67]

[67]Wawancara dengan Pak Budi. Pada tanggal 10 Agustus 2015. Pukul 11.15 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Demontrasi Buruh dilihat dari Kaca Mata Teori Konflik Sosial Karl Marx

Berdasarkan pada tema di dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti tentang "*Demontrasi Buruh dan Gerakan Sosial*", peneliti melihat bahwa dalam kehidupan yang sudah berkembang dan maju pesat ini, masih saja ada yang namanya pembodohan. Walaupun di Indonesia ini adalah negara demontrasi ,yang mana mereka mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan keluhan selama pekerja, akan tetapi hal ini juga bisa membuat permasalahan tersendiri bagi pelaku aksi demontrasi tersebut bilamana perusahan tersebut tidak memberikan ijinnya untuk melakukan aksi demontrasi.

Demontrasi ini merupakan sebuah konflik sosial yang selalu terjadi dikalangan buruh atau pekerja apabila hak-hak mereka belum bisa terpenuhi dengan baik oleh pihak perusahaan, konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat ini hanya sebuah bentuk ketidakpuasan dalam menerima perlakuan dalam melakukan tugasnya. Dalam sebuah konflik sosial tindak yang dilakukan ini bukanlah tanpa sebab yang pasti, yang mana pelaku aksi demontrasi ini dipicu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang belum mereka peroleh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja.

Permasalahan yang saat ini terjadi adalah adanya kenaikkan harga-harga pokok, kenaikkan BBM yang mana membuat para pekerja merasa untuk meminta haknya untuk mendapatkan upah lebih agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin melonjak, maka dari itu para buruh melakukan sebuah aksi demontrasi untuk mendapatkan sebuah kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintahan maupun dari perusahaan itu sendiri dengan melakukan aksi demontrasi. Demontrasi ini dilakukan dengan sebuah proses yang mana tidak dilakukan dengan begitu saja, para buruh ini memiliki pengorganisasian yang tersusun agar hasil yang mereka dapat bisa membuahkan hasil yang mereka inginkan dan sesuai dengan kebutuhan hidup yang sekarang ini.

Aksi demontrasi merupakan salah tindakan yang akan terjadi ketika permasalahan-permasalahan yang timbul dilingkungan masyarakat tidak bisa dipecahkan secara kepala dingin atau tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah baik-baik. Aksi-aksi ini selalu menimbulkan sebuah ketertarikkan tersendiri untuk dapat dilihat maupun dijadikan sebuah wacana dan bisa dijadikan sebuah pengalaman tersendiri bagi para pelaku yang mengikuti aksi-aksi dalam berdemontrasi ini.

Ketika proses demontrasi bisa berjalan dengan yang telah disiapkan oleh para buruh, maka aksi demontrasi ini dapat memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan sebelum aksi ini terjun dilapangan dan tanpa harus berlama-lama dengan tuntutan yang kurang bisa diterima oleh pihak-pihak pemerintahan. Karena sebuah proses itu akan selalu ada ketika para buruh akan menyiapkan diri untuk menuntut hak-hak mereka. Antara lain adalah :

a. Terpenting adalah adanya isu-isu yang telah menyebar dikalangan buruh, tentang tuntutan kenaikkan Upah Minimum Regional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dan sebuah proses itu akan muncul. Proses yang ada di orgaisasi FSPMI ini ada 3 yaitu konsep, lobi dan aksi. Yang akan menjadikan proses demontrasi bisa berjalan dengan selayaknya.
c. Prosesnya itu harus bisa dikonsep terlebih dahulu agar sesuai dengan yang dituntutkan, barulah melakukan lobi-lobi dengan pemerintahan, dan setelahnya baru melakukan aksi dengan cara demontrasi.
d. Pendapat yang serupa juga diungkapkan tentang proses terjadinya demontrasi itu harus mengajukan tuntutan dengan konsep yang jelas, melakukan lobi-lobi dengan pihak-pihak tertentu, apabila lobi-lobi yang dilakukan belum menemukan titik temu baru melakukan yang namanya aksi demontrasi.
e. Proses demontrasi adalah sebuah keharusan yang akan selalu terjadi. Agar dasar yang dilakukan bisa berjalan dengan sesuai harapan dan tidak menimbulkan aksi-aksi yang berkepanjangan.
f. Proses yang bisa dilakukan secara struktural dengan menggunakan konsep, loby dan aksi yang sebelumnya telah dirundingkan terlebih dahulu tentang konsekuensi yang akan diperoleh dari demontrasi.

Berdasarkan uraian mengenai proses aksi demontrasi buruh dalam menyikapi kebijakan Upah Minimum Regional tingkat kabupaten ini, para buruh harus melakukan proses yang sudah diterapkan. Karean di FSPMI sendiri memiliki 3 proses yang disebut KLA (Konsep, Loby, dan Aksi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses demontrasi sendiri ini para buruh harus bisa mempunyai sebuah penuturan yang dapat membawa hasil dari ke 3 proses.

Dan dari sebuah proses yang telah terjadi pasti hasil yang didapat selanjutnya adalah sebuah dampak yang akan timbul setelah melakukan sebuah aksi demontrasi tentang kenaikkan Upah Minimum Regional, dampak yang akan dirasakan oleh para buruh juga bagi pihak perusahaan sendiri. Dampak yang dirasakan ini sebagai tindakan yang telah buruh lakukan, namun konsekuensi tersebut telah menjadi sebuah tindakan yang telah ditimbulkan. Tinggal bagaimana pihak perusahaan bisa menerima semua kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan atau pun yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintahan untuk kenaikkan Upah Minimum Regional ini. Karena dampak yang akan diterima buruh atau pun perusahaan harus bisa diterima kedua belah pihak sebagai konsekuensi yang ditimbulkan, karena sebuah permasalahan atau konflik yang terjadi ini akan berimbas pada mereka yang telah menyulutkan konflik.

Sebuah konflik ini timbul ketika sebuah fenomena dikalangan masyarakat kurang bisa diperhatikan dengan baik dan kurang bisa dipahami dengan benar oleh pelaku-pelakunya, karena konflik merupakan sebuah gejala sosial yang akan selalu hadir dalam kehidupan sosial. Konflik yang timbul dalam perusahaan tersebut adalah sebagai salah satu contoh yang mana permasalahan itu terjadi tidak melihat dimana tempatnya ataupun waktunya, karena konflik yang timbul itu bisa muncul dengan tiba-tiba. Dan tidak bisa mempredeksikan konflik dalam lingkungan itu terjadi maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti dengan sendirinya, namun harus bisa mengatasi dalam keadaan apapun.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang mana mempelajari bahwa seorang pengusaha dan pekerjanya memiliki status yang berbeda dan membedakannya menjadi kelas-kelas antara kaum proletar maupun borjuis. Yang mana kaum borjuis ini menindas dan membodoh-bodohi kaum proletar, karena kaum borjuis mempunyai kekuasaan yang lebih untuk bisa mengatur dan memberikan wewenang yang lebih agar bisa melakukan tindakan untuk memerintah kaum proletar. Dengan melakukan pembodohan terhadap karyawannya, yaitu tidak memberikan hak-haknya sebagai seorang buruh yang sesuai dengan ketentuan dan memperlakukan buruh dengan seenaknya saja tanpa memperdulikan kebutuhannya. Padahal antara pengusaha dengan buruh ini memiliki keterkaitan dengan saling membutuhkan satu sama lain, namun dengan adanya suatu kekuasaan yang pengusaha miliki ini membuat buruh harus mendapatkan perlakuan yang terkadang bisa memberikan dampak yang kurang bisa dipahami.

Marx selalu mengemukakan bagaimana hubungan antara manusia terjadi dilihat dari hubungan antara posisi masing-masing terhadap sarana-sarana produksi, yaitu dilihat dari usaha yang berbeda dalam mendapatkan sumber- sumber daya yang langka. Ia mencatat bahwa perbedaan atas sarana tidak selalu menjadi penyebab pertikaian antar golongan. Tetapi dia membenarkan bahwa tiap golongan masyarakat mempunyai cara khas yang dapat menimbulkan konflik antar golongan karena masyarakat secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis menghasilkan perbedaan pendapat antara orang-orang atau golongan yang berbeda tempat atau posisinya di dalam suatu struktur sosial dan lebih penting lagi dalam hubungannya dengan sarana produksi. Marx memiliki anggapan yang begitu kuat bahwa posisi di dalam struktur sedemikian ini selalu mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib mereka.

Dan dari uraian diatas tersebut menunjukkan bahwa suatu konflik yang terjadi dikalangan masyarakat industri ini timbul karena ketidakadilan yang telah buruh terima di tingkat perusahaan maupun dari kebijakan pemerintahan yang kurang bisa memahami nasib buruh yang masih kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak memberikan hak-haknya yang telah tercantum dalam undang-undang yang telah berlaku. Dan dapat diketahui bahwa ketidaksetaraan kelas dapat menimbulkan konflik yang pelik antara pengusaha dan buruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id